

**PERANAN AUDIT OPERASIONAL DALAM
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KEGIATAN
PERKREDITAN (STUDI KASUS PADA
BPR ROKAN HULU)**

SKRIPSI

OLEH

RATNA SARI
NIM: 10973005670



**PROGRAM S.1
JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

**PERANAN AUDIT OPERASIONAL DALAM
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KEGIATAN
PERKREDITAN (STUDI KASUS PADA
BPR ROKAN HULU)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH

RATNA SARI
NIM: 10973005670



**PROGRAM S.1
JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

ABSTRAK

PERANAN AUDIT OPERASIONAL DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PERKREDITAN (STUDI KASUS PADA BPR ROKAN HULU)

*Oleh:
Ratna Sari*

Penelitian ini dilakukan pada BRR Rokan Hulu yaitu untuk melihat bagaimana pelaksanaan audit operasional yang dijalankan oleh bank tersebut dan apakah pelaksanaan audit operasional bidang perkreditan telah dilaksanakan secara memadai berdasarkan SPFAIB serta untuk mengetahui bagaimana peranan audit operasional dalam meningkatkan efektivitas kredit pada BPR Rokan Hulu. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang menggunakan data primer dan data sekunder yang masih memerlukan pengolahan dari penulis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan audit operasional pada BPR Rokan Hulu dilaksanakan oleh auditor internal selaku bagian SPI pada bank tersebut yang telah independen dalam menjalankan audit serta berpedoman pada SPPAI, selain itu pelaksanaan audit operasional bidang perkreditan yang dilakukan telah memadai sesuai dengan SPFAIB yang berlaku dan pelaksanaan audit operasional ternyata berperan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan yang dijalankan BPR Rokan Hulu yang dapat dilihat dari NPL kredit yang menurun dari 4,7% pada tahun 2010 menjadi 2,9% pada tahun 2011 walaupun pada tahun 2012 NPL agak meningkat menjadi 3,09%. hal ini disebabkan oleh bank menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari auditor sehingga efektivitas kredit dapat terus ditingkatkan.

Kata Kunci: Audit operasional, efektivitas, kredit

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya bagi Allah SWT, Pemelihara seluruh alam raya, yang atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Tugas akhir ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas. terselesaikannya skripsi ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak. Oleh karena itu, tak salah kiranya bila penulis mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Ayah dan ibu dirumah, terima kasih atas do'a dan pengorbanannya selama ini. Tidak pernah lelah berusaha untuk anakmu ini dan selalu mengikuti keinginanku sampai aku menjadi pribadi yang mandiri dan berilmu.
2. Adik-adikku tersayang terima kasih sudah menjadi adik-adik yang baik dan sabar mendengar keluh-kesahku serta dukungan yang sangat berarti ini.
3. Kakak-kakakku terima kasih atas pengalaman dan kebutuhan finansial yang telah diberikan sehingga aku tetap optimis mampu untuk menyelesaikan tugas akhir ini
4. Bapak Dr. Mahendra Romus selaku Dekan Fakultas ekonomi yang telah memberi kemudahan bagi mahasiswa/i nya untuk menyelesaikan tugas akhir dan mendukung semua kegiatan yang dapat meningkatkan intelektual mahasiswa/i nya.

5. Bapak Dony Martias sebagai ketua jurusan Akuntansi yang sangat mendukung mahasiswa/i nya untuk segera menyelesaikan studinya.
6. Ibu Desrir Miftah selaku Pembimbing Akademik penulis yang selalu memberikan motivasi berarti bagi mahasiswa/i nya untuk selalu optimis dalam segala hal.
7. Bapak Mulya Sosiady, SE, MM. Ak selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk bisa menyelesaikan tugas akhirnya ini.
8. Bapak/Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan ilmunya kepada penulis sehingga mengetahui lebih banyak.
9. Bapak/ ibu perputakaan yang telah bersedia meminjamkan Buku hingga penulis dapat menambah pengetahuan berkat membaca.
10. Buat calon imamku, terima kasih buat motivasi yang diberikan disaat jenuh datang melanda.
11. Semua teman-teman yang telah banyak membantu semua proses penulisan skripsi ini dan dukungan semangat yang tak tenilai harganya. Terima kasih teman-temanku tersayang.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu saya dan tidak bisa saya sebutkan.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Amin

Semoga karya penelitian yang telah saya susun ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua pihak yang membaca dan memahami karya ini dan dapat bernilai ibadah di hadapan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Pekanbaru, 17 September 2013

RATNA SARI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2. Manfaat Penelitian	6
1.4 Batasan penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Audit.....	9
2.1.1 Pengertian Audit.....	9
2.1.2 jenis-jenis Auditor	10
2.1.3 Tipe Audit	11
2.1.4 Pengertian Audit Operasional	12
2.1.5 Kriteria dan Ruang Lingkup Audit Operasional	13
2.1.6 Tujuan Audit Operasional	15
2.1.7 Tipe Audit Operasional	16
2.1.8 Tahap-tahap Audit Operasional	17
2.1.9 Perbedaan Audit Keuangan dan Audit Operasional.....	19
2.2. Bank	20

2.1.1 Pengertian Bank	20
2.1.2 jenis-jenis Bank	20
2.1.3 Resiko Bank	21
2.3. Kredit.....	22
2.3.1 Pengertian Kredit dan Tujuan Kredit	22
2.3.2 jenis-jenis Kredit	23
2.3.3 Unsur-unsur Kredit	25
2.3.4 Prinsip-prinsip pemberian Kredit.....	26
2.3.5 Prosedur dalam pemberian Kredit.....	28
2.3.6 Kebijakan Kredit	32
2.3.7 Pengawasan kredit.....	33
2.4 Efektivitas	34
2.5 Efektivitas kegiatan Perkreditan	34
2.6 Pandangan Terhadap Audit dan Kredit	37
2.7 Penelitian Terdahulu	39

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	41
3.2 Jenis dan Sumber Data	41
3.3 Metode Pengumpulan Data	41
3.4 Analisis Data	42

BAB IV GAMBARAN UMUM BPR ROKAN HULU

4.1. Sejarah Singkat BPR Rokan Hulu	43
4.2. Prosedur Pemberian Kredit pada BPR Rokan Hulu.....	46
4.2.1 Proses Kredit Baru.....	46
4.2.2 Perpanjangan Kredit	47
4.2.3 Pelunasan Kredit sebelum Jatuh Tempo.....	47
4.2.4 Perubahan Fasilitas atau Jaminan Kredit.....	48

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Pelaksana Audit Operasional	49
--	----

5.2 Pemeriksaan Kredit	51
5.3 Tujuan Audit Kredit	52
5.4 Pelaksanaan Audit Operasional Kredit	53
5.4.1 Tahap Persiapan	53
5.4.1.1 Metode Pendekatan	53
5.4.1.2 Penetapan Penugasan	53
5.4.1.3 Pemberitahuan Audit	54
5.4.1.4 Penelitian Pendahuluan	55
5.4.2 Penyusunan Program	55
5.4.3 Pelaksanaan Penugasan	56
5.4.5.1 Uji Pengendalian	56
5.4.5.2 Pemeriksaan Pengelolaan Kredit	57
5.4.4 Pelaporan Hasil Audit	67
5.4.5 Tindak Lanjut Hasil Audit	67
5.4.6 Dokumentasi dan Administrasi	68
5.5 Peranan Audit Operasional dalam Meningkatkan Efektivitas Kredit	68

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan	72
6.1. Keterbatasan Penelitian	73
6.2. Saran	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan usaha jasa perbankan pada saat ini semakin maju hingga ke pelosok desa, yaitu sebagai lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian di Indonesia. Dunia perbankan juga banyak melahirkan Bank-bank baru. Ditandai dengan munculnya Bank-bank berbasis syariah yang siap bersaing dengan Bank umum lainnya. Lembaga Bank di Indonesia saat ini sudah meliputi Bank Umum, Bank BPR, Bank Umum Syariah dan Bank BPR Syariah.

Pengertian Bank itu sendiri sebagaimana tercantum dalam UU RI no.10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian Perbankan akan bergerak dalam kegiatan perekonomian dan berbagai pelayanan jasa.

Suatu Bank harus mampu bersaing dengan lembaga keuangan Bank ataupun nonbank untuk dapat bertahan dengan adanya globalisasi ekonomi saat ini dengan menjaga kesehatan Bank nya. Bank secara individual dikatakan sehat jika mampu memelihara kontinuitas usahanya dengan baik, sehingga dapat memenuhi kewajibannya terhadap semua pihak yang berkepentingan serta dapat menunjang sistem perbankan yang sehat dan efisien. Dalam arti, pemilik memperoleh keuntungan yang wajar, masyarakat

dilindungi kepentingannya, dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha akan pembiayaannya, dan akhirnya dapat menunjang sistem perbankan secara keseluruhan yang berarti menunjang perekonomian pada umumnya.

Begitu pentingnya kesehatan Bank sehingga tuntutan terhadap pengawasan Bank semakin besar pula, oleh karena disamping adanya peningkatan fungsi intermediasi Bank, peningkatan operasi perbankan juga menunjukkan bahwa resiko yang ditanggung oleh perbankan juga semakin besar. Disamping masalah-masalah internal, pengawasan yang efektif untuk menunjang pertumbuhan Bank yang sehat sangat diperlukan bila diperhatikan faktor-faktor eksternal, yaitu adanya persaingan tajam antarbank serta perkembangan pasar modal dan lembaga keuangan nonbank yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap perkembangan pasar uang.

Pengawasan operasional Bank sangat diperlukan untuk menghindari resiko yang dapat merugikan Bank. pengawasan operasional Bank dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional Bank telah berjalan efektif dan efisien serta melakukan perbaikan atas segala permasalahan yang ditemukan. Sarana yang digunakan Bank untuk mengawasi efektivitas kegiatan operasionalnya adalah dengan melakukan audit operasional.

Audit operasional adalah penelaahan atas prosedur dan metode operasi entitas untuk menentukan tingkat efesiensi dan efektivitasnya. Audit operasional kadang-kadang disebut juga sebagai audit kinerja, audit manajemen atau audit komprehensif. Secara internasional, istilah yang paling sering digunakan untuk audit operasional adalah audit nilai uang (*value for money auditing*) (Dan M Guy;2003;419).

Salah satu operasional utama Bank yang perlu dilakukan audit operasional adalah kegiatan kreditnya karena kredit merupakan aset Bank yang memiliki resiko (*risk asset*). Kredit dikuasai pihak luar yaitu pihak debitur yang mudah diselewengkan dan disalahgunakan. Penyaluran kredit yang diberikan kepada masyarakat membutuhkan pengawasan yang terprogram dan terkendali sehingga kredit diberikan kepada nasabah yang bertanggungjawab dan dapat dipercaya untuk melunasi hutangnya tepat waktu.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang diwajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Ismail; 2011).

Penyaluran kredit yang tidak tepat sasaran akan menimbulkan resiko kredit bermasalah bagi Bank yang akan menurunkan tingkat kesehatan Bank. Bank harus menekan resiko munculnya kredit bermasalah ini seminim mungkin. Ketentuan Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa *Non Performing Loan's (NPL)* atau kredit macet yang dialami oleh suatu Bank tidak boleh lebih dari 5% terhadap total baki debetnya. Bank sebagai lembaga intermediasi juga harus melaksanakan kegiatan perkreditan dengan menganut prinsip kehati-hatian (*prudential priciple*) agar kredit yang diberikan tepat guna dan tepat sasaran.

Selain memiliki unsur resiko, kredit juga memiliki unsur ketidakpastian dalam pengembalian kredit yang telah disalurkan.

Ketidakpastian pengembalian kredit akan berpengaruh terhadap efektivitas kredit yang dijalankan. Untuk itu, sebelum kredit dicairkan Bank harus cermat dalam melaksanakan prosedur kredit agar kredit yang disalurkan kecil kemungkinan terjadinya kredit macet.

Pelaksanaan audit operasional terhadap kredit tidak lain adalah bertujuan untuk menekan dan memperkecil segala resiko yang ada dalam kredit agar kredit yang dijalankan tetap efektif dan efisien. Audit operasional terhadap kredit dilakukan dengan menelaah kembali prosedur kredit yang dijalankan untuk kemudian diberikan rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas kredit.

BPR Rokan Hulu adalah Bank yang turut berperan dalam mengembangkan perekonomian yang ada di Rokan Hulu, walaupun Bank ini belum memiliki cabang namun BPR ini tetap berambisi untuk menjadi BPR terbaik di Propinsi Riau pada tahun 2017. Untuk mencapai visinya ini BPR Rokan Hulu turut andil dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Rokan Hulu. Salah satunya dengan memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Jenis kredit yang diberikan adalah kredit modal kerja dan kredit konsumtif.

Audit operasional bidang kredit juga dilakukan BPR Rokan Hulu untuk meningkatkan efektivitas kredit. Dalam menjalankan kegiatan kredit, BPR Rokan Hulu tidak dapat lepas dari yang namanya kredit bermasalah. Permasalahan kredit yang ditemukan dalam audit operasional pada BPR Rokan Hulu ini diantaranya adalah kurang lengkapnya data analisis ketika

survey pertama dilakukan, kondisi usaha nasabah yang menurun, fluktuasi harga perkebunan. Masalah-masalah mengakibatkan resiko kredit bermasalah atau kredit macet yang akan dihadapi oleh Bank. Sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 1.1.
Kredit

No	Keterangan	Outstanding kredit	Tidak Lancar
1	TAHUN 2010	15,076,887,824.00	708,531,739.00
2	TAHUN 2011	19,628,794,033.00	559,081,918.00
3	TAHUN 2012	25,189,160,698.00	777,450,628.00

Sumber: BPR Rokan Hulu

Audit operasional kredit dilakukan minimal 1 tahun sekali. Pelaksanaan audit operasional dilaksanakan oleh auditor intern Bank BPR Rokan Hulu. Audit operasional akan berperan dalam meningkatkan efektivitas kredit pada BPR Rokan Hulu jika audit operasional dilaksanakan secara memadai dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Audit Operasional dalam Meningkatkan Efektivitas Kegiatan Perkreditan (Studi Kasus pada BPR Rokan Hulu)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan audit operasional yang dijalankan BPR Rokan Hulu?

2. Apakah pelaksanaan audit operasional kegiatan perkreditan yang dijalankan BPR Rokan Hulu telah memadai?
3. Bagaimana peranan audit operasional dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan pada BPR Rokan Hulu?

1.3. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian:

1. Untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan audit operasional kegiatan perkreditan BPR Rokan Hulu
2. Untuk mengetahui apakah audit operasional kegiatan perkreditan BPR Rokan Hulu telah memadai.
3. Untuk mengetahui peranan audit operasional dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan pada BPR Rokan Hulu.

1.3.2 Mamfaat Penelitian:

1. Bagi penulis bermamfaat untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana peranan audit operasional dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan pada BPR Rokan Hulu.
2. Sebagai masukan bagi pihak manajemen BPR Rokan Hulu dalam pelaksanaan audit operasional dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan.
3. Dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang berkeinginan untuk melakukan penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang sama di masa yang akan datang.

1.4. Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya meneliti tentang peranan audit operasional dalam meningkatkan efektivitas kredit yang dilihat dari data NPL Kredit 3 tahun terakhir pada BPR Rokan Hulu sementara aspek lain tidak diteliti. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, keterbatasan informasi atau data yang diberikan dan keterbatasan biaya yang ada.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan ini akan menggunakan sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

- Bab I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penelitian.
- Bab II : Bab ini berisikan teoritis yang mendukung pembahasan masalah diantaranya pengertian, audit, jenis auditor tipe audit, audit opeasional, lingkup audit operasional, tipe audit operasional, tahap audit operasional, perbedaan audit keuangan dan operasional, bank, jenis bank, resioko bank, pengertian kredit, unsur-unsur kredit, tujuan dan fungsi kredit, penentuan kebijakan kredit, perencanaan dan pemberian kredit, prosedur dalam pemberian kredit, pengertian efektivitas, efektivitas kegiatan perkreditan, pandangan islam terhadap audit dan kredit.

- Bab III : Bab ini menguraikan metodologi penelitian yang dipakai oleh penulis dalam menyelesaikan penelitiannya.
- Bab IV : Bab ini berisikan tentang sejarah singkat BPR Rokan Hulu, struktur organisasi Bank, kegiatan usaha Bank dan prosedur kredit yang dijalankan
- Bab V : Bab ini menjelaskan tentang pembahasan dan hasil penelitian yang membandingkan teori dengan praktiknya pada Bank tersebut.
- Bab VI : Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab dahulu yang kemudian akan diberikan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Auditing

2.1.1. Pengertian Auditing

Untuk mengetahui dengan jelas pengertian auditing, berikut adalah pengertian Auditing dari beberapa sumber:

Pengertian auditing adalah : “suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Sedangkan Pengertian Audit Sukrisno Agoes (2004;3) adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Dan M. Guy (2002;5) juga juga menyebutkan bahwa American Accounting Association Committee (AAAC) mendefenisikan Audit sebagai:

“Suatu proses sistematis yang secara obyektif memperoleh dan mengevaluasi bukti yang terkait dengan pernyataan mengenai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan

tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan beberapa aspek dari audit, yaitu :

1. Sebagai proses yang sistematis, audit adalah suatu pendekatan yang logis, terstruktur, dan jelas tujuannya bagi pengambilan keputusan.
2. Proses pengumpulan bukti dan pengevaluasian terhadap bukti tersebut haruslah objektif.
3. Komponen dasar dari proses audit adalah pengumpulan bukti berkaitan dengan pernyataan mengenai tindakan atau kejadian ekonomi.
4. Ketika mengaudit laporan keuangan, tujuan auditor adalah menentukan apakah pernyataan pihak yang diaudit sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yang merujuk pada prinsip akuntansi yang berlaku umum.
5. Ketika pekerjaan audit telah selesai maka auditor harus mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, pemerintah, bankir dan kreditor.

2.1.2. Jenis-jenis Auditor

Dan M Guy (2002;11) mengklasifikasikan jenis Auditor menjadi 3, yaitu: auditor independen, auditor internal, dan auditor pemerintah.

a. Auditor independen

Auditor independen disebut juga *auditor eksternal* yaitu *akuntan publik bersertifikat* yang mempunyai kantor praktik sendiri dan menawarkan jasa audit serta jasa lain kepada klien.

b. Auditor internal

Auditor internal adalah karyawan tetap yang dipekerjakan oleh suatu entitas untuk melaksanakan audit dalam organisasi tersebut. Tugas utama auditor internal adalah melaksanakan audit ketaatan dan audit operasional. Auditor internal dapat memiliki ijazah sebagai *Certified Internal Auditors* (CIA) yang dikeluarkan oleh *institute of internal Auditors*.

c. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah ditugaskan untuk menentukan ketaatan dengan hukum, peraturan perundangan, kebijakan, dan prosedur.

2.1.3. Tipe Audit

Audit dapat dibagi menjadi beberapa tipe. Pembagian ini dimaksudkan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan diadakannya suatu kegiatan audit tersebut.

Sukrisno Agoes (2004;10) menyatakan bahwa auditing umumnya pada umumnya digolongkan menjadi 3 golongan yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional.

a. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Dalam laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum.

b. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan adalah audit yang tugasnya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.

c. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional merupakan review secara sistematis kegiatan organisasi atau bagian dari padanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu.

Tujuan audit operasional adalah untuk :

- 1) Mengevaluasi kinerja
- 2) Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan
- 3) Membuat rekomendasi untuk perbaikan dan tindakan lebih lanjut

2.1.4. Pengertian Audit Operasional

Audit operasional memfokuskan penilaiannya pada efesiensi dan efektivitas operasi suatu entitas. Menurut Dan M. Guy (2003;419) audit operasional merupakan penelaahan atas prosedur dan metode operasi entitas untuk menentukan tingkat efesiensi dan efektivitasnya.

Efektivitas mengukur seberapa berhasil suatu organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. *Efesiensi* mengukur seberapa baik entitas menggunakan sumberdayanya dalam mencapai tujuannya.

Sedangkan menurut Boynton (2003;498) Audit operasional adalah suatu proses sistematis yang mengevaluasi efektifitas, efesiensi, dan

kehematan operasi organisasi yang berada dalam pengendalian manajemen serta melaporkan kepada orang-orang yang tepat hasil-hasil evaluasi tersebut beserta rekomendasi perbaikan.

Selain itu Sukrisno dan Hoesada (2009;146) menyebutkan bahwa audit operasional adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

2.1.5. Kriteria dan Ruang Lingkup Audit Operasional

Kesulitan utama yang umumnya dihadapi dalam audit operasional adalah menentukan kriteria audit untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas organisasi. Berbeda dengan audit keuangan, dalam audit operasional tidak terdapat kriteria tertentu yang berlaku umum untuk setiap audit.

Dengan adanya kriteria pemeriksaan dapat menentukan apakah suatu kondisi yang ada menyimpang atau tidak dan kondisi yang diharapkan. Karena pemeriksaan pada intinya merupakan proses perbandingan antara kenyataan yang ada dengan suatu kondisi yang diharapkan maka pada audit operasional pun diperlukan adanya kriteria.

Arens et al (2008;847) menyebutkan beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam audit operasional, yaitu :

a. Historical Performance (Kinerja Historis)

Merupakan seperangkat kriteria sederhana yang dapat didasarkan pada hasil audit periode sebelumnya. Gagasan di balik

penggunaan kriteria ini adalah membandingkan apakah yang telah dilakukan menjadi “lebih baik” atau “lebih buruk”. Manfaat kriteria ini adalah bahwa kriteria tersebut mudah dibuat, tetapi mungkin tidak memberikan pandangan mendalam mengenai seberapa baik atau buruk sebenarnya unit usaha yang diperiksa dalam melakukan sesuatu.

b. *Benchmarking* (Kinerja yang dapat diperbandingkan)

Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil yang dicapai oleh organisasi lain yang sejenis. Walaupun penilaian prestasi masa lalu, tetapi hasil penilaian menggunakan kriteria ini pun belum tentu memberikan gambaran yang tepat mengenai keadaan organisasi, karena perbedaan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh dua organisasi yang berbeda.

c. *Engineered Standards* (Standar Rekayasa)

Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan standar rekayasa, seperti penggunaan time and motion study untuk menentukan banyaknya output yang harus diproduksi.

d. *Discussion and Agreement* (Diskusi dan Kesepakatan)

Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil diskusi dan persetujuan bersama antara manajemen dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam audit operasional.

Ruang lingkup Audit Operasional merupakan seluruh aspek manajemen (baik seluruh atau sebagian dari program/ aktivitas yang dilakukan), tinjauan kebijaksanaan operasinya, perencanaan, praktik

(kinerja), hasil dari kegiatan dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, audit dilakukan tidak terbatas hanya pada masalah akuntansinya saja, melainkan dari segala bidang yang berhubungan dengan perusahaan seperti kepegawaian.

2.1.6. Tujuan Audit Operasional

Tujuan dari Audit operasional menurut Dan M. Guy (2003;421) adalah sebagai berikut:

- a. *Menilai kinerja* setiap audit operasional meliputi penilaian kinerja organisasi yang ditelaah. Penilaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kegiatan tujuan seperti kebijakan, standar, dan sasaran organisasi serta dengan kriteria penilaian lain yang sesuai.
- b. *Mengidentifikasi peluang perbaikan* peningkatan efektifitas, efesiensi, dan ekonomi merupakan kategori yang luas dari pengklasifikasian sebagian besar perbaikan.
- c. *Mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut* sifat dan luas rekomendasi akan berkembang secara beragam selama pelaksanaan audit operasional.

Menurut Bayangkara, IBK (2008;177) :

“Audit operasional bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut”.

Berkaitan dengan tujuan audit tersebut, titik berat audit diarahkan terutama pada berbagai objek audit yang diperkirakan dapat diperbaiki di masa yang akan datang, di samping juga mencegah kemungkinan terjadinya berbagai kerugian.

2.1.7. Tipe Audit Operasional

Menurut Arens et al (2008;844) ada 3 tipe audit operasional terdiri dari :

a. Audit Fungsional (*Functional Audits*)

Audit fungsional berkaitan dengan sebuah fungsi atau lebih dalam suatu organisasi, misalnya fungsi pengeluaran kas, penerimaan kas, pembayaran gaji. Audit fungsional memungkinkan adanya spesialisasi oleh auditor.

Auditor yang merupakan staf dari internal audit dapat lebih efisien memakai seluruh waktu mereka untuk memeriksa dalam bidang tersebut. Tapi disamping itu, audit fungsional memiliki kekurangan yaitu tidak dievaluasinya fungsi yang saling berkaitan.

b. Audit Organisasional (*Organizational Audits*)

Audit organisasional menyangkut keseluruhan unit organisasi, seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan. Penekanan dalam audit ini adalah seberapa efisien dan efektif fungsi-fungsi saling berinteraksi. Rencana organisasi dan metode-metode untuk mengkoordinasikan aktivitas yang ada, sangat penting untuk audit jenis ini.

c. Penugasan Khusus (*Special Assignments*)

Penugasan khusus timbul atas permintaan manajemen, sehingga dalam audit jenis ini terdapat banyak variasi. Misalnya adalah menentukan penyebab sistem EDP yang efektif, penyelidikan kemungkinan fraud dalam suatu divisi dan membuat rekomendasi untuk mengurangi biaya pembuatan suatu barang.

2.1.8. Tahap-tahap Audit Operasional

Ada beberapa tahap yang dilakukan dalam melaksanakan Audit Operasional menurut Boynton (2003;499) yaitu:

1. Memilih Auditee

Pemilihan Auditee dimulai dengan studi pendahuluan terhadap calon-calon auditee dalam entitas untuk mengidentifikasi aktifitas yang mempunyai potensi audit tertinggi. Pemahaman tentang calon auditee diperoleh dengan:

- a. Mereview data arsip latar belakang setiap auditee
- b. Meninjau fasilitas auditee untuk memastikan bagaimana auditee mencapai tujuannya
- c. Mempelajari dokumentasi yang relevan tentang operasi auditee
- d. Mewawancarai manajer aktivitas tersebut mengenai bidang-bidang permasalahan tersebut (entry interview)
- e. Menerapkan prosedur analisis untuk mengidentifikasi tren atau hubungan yang tidak biasa
- f. Melakukan pemeriksaan audit mini untuk menegaskan atau menjernihkan pemahaman auditor tentang masalah yang potensial

2. Merencanakan Audit

Landasan utama dari perencanaan audit adalah pengembangan program audit yang harus dibuat sesuai dengan keadaan auditee yang ditemui pada tahap studi pendahuluan audit. Perencanaan audit juga mencakup pemilihan tim audit dan penjadwalan pekerjaan. Pekerjaan audit juga harus dijadwalkan melalui konsultasi dengan auditee agar ada kerja sama maksimum dari personil auditee selama audit.

3. Melaksanakan audit

Selama melaksanakan audit, auditor secara ekstensif harus mencari fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah teridentifikasi dalam auditee selama studi pendahuluan. Pelaksanaan audit adalah tahap yang paling memakan waktu dalam audit operasional. Tahap ini disebut sebagai melakukan audit yang mendalam (*in-depth audit*).

4. Melaporkan temuan

Laporan audit operasional harus memuat:

- a. Suatu pernyataan tentang tujuan dan ruang lingkup audit
- b. Uraian umum mengenai pekerjaan yang dilakukan dalam audit
- c. Ikhtisar temuan-temuan
- d. Rekomendasi perbaikan
- e. Komentar auditee

Konsep laporan audit operasional dibuat oleh auditor penanggungjawab. Konsep tersebut kemudian dibahas dengan manajer unit yang diaudit. Pembahasan ini memenuhi beberapa tujuan yang penting:

- a. Memberi auditor peluang untuk menguji akurasi temuan serta ketepatan rekomendasi
 - b. Memungkinkan auditor mendapatkan komentar auditee untuk dimasukkan dalam laporan.
5. Melakukan tindak lanjut

Tahap tindak lanjut dalam audit operasional adalah tahap bagi auditor untuk menindaklanjuti tanggapan auditee terhadap laporan audit.

2.1.9. Perbedaan Audit Keuangan dan Audit Operasional

Sebelum melaksanakan audit operasional, hendaknya perlu diketahui mengenai perbedaan antara audit operasional dengan audit keuangan biasa. Menurut Arens et al (2008;482) menyatakan Perbedaan audit operasional dan audit keuangan adalah :

- a. Audit keuangan berorientasi pada masa lalu dan lebih menekankan pada apakah informasi historis dicatat dengan benar. Sedangkan audit operasional berorientasi menekankan pada efisiensi dan efektivitas.
- b. Dalam hal distribusi laporan, audit keuangan ditujukan kepada banyak pemakai laporan keuangan dan didistribusikan secara detil. Sedangkan laporan audit operasional sangat berbeda dari satu audit ke audit lainnya karena keterbatasan distribusi operasional dan beragamnya sifat audit untuk efisiensi dan efektivitas.
- c. Pada keterlibatan bidang bukan keuangan, audit operasional mencakup banyak aspek efisiensi dan efektivitas dalam sebuah badan

usaha. Audit keuangan dibatasi hanya pada hal-hal yang langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.

2.2. Bank

2.2.1. Pengertian Bank

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan (Ismail;2011;12) yang dimaksudkan dengan Bank adalah :

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Adapun pengertian Bank menurut *Global Association of Risk Professionals* (GARP) dan *Badan Sertifikasi Manajemen Resiko* (Ferry N. Idroes Sugiarto;2006;3) adalah suatu lembaga yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan utama meneriam deposito, memberikan pinjaman, menerima dan menerbitkan cek.

2.2.2. Jenis Bank

Di dalam Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 jenis Bank ada 2 (Kasmir;2005;35) yaitu:

a. Bank Umum

Bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam artian dapat memberikan seluruh

jasa perbankan yang ada. Begitu juga dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sehingga jasa yang diberikan oleh BPR lebih sempit dari pada jasa yang diberikan oleh Bank Umum.

2.2.3. Resiko Bank

Dalam melakukan bisnisnya, bank menghadapi resiko seperti risiko kredit, risiko suku bunga, risiko kekurangan likuiditas, dan risiko manajemen (Ktut Silvanita; 2009;29).

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah pinjaman tidak kembali sesuai dengan kontrak, seperti penundaan, pengurangan pembayaran suku bunga, dan atau pinjaman pokoknya, atau tidak membayar pinjamannya sama sekali.

b. Risiko suku bunga

Perubahan suku bunga dapat mengakibatkan perubahan keuntungan bank. Hal itu disebabkan karena adanya ketidakcocokan antara suku bunga aset dan suku bunga kewajiban.

c. Risiko likuiditas

Risiko kekurangan likuiditas terjadi karena adanya *rush*-penarikan dana secara serentak yang dapat mengakibatkan kebangkrutan bank

d. Risiko manajemen

Bank menghadapi risiko bila manajer bank melakukan bahaya moral.

2.3. Kredit

2.3.1. Pengertian kredit dan tujuan kredit

Pengertian kredit dalam Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 (Ismail; 2011;190) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu mendatang (Simorangkir; 2006;100).

Fungsi pokok dari kredit pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, dalam rangka mendorong dan memperlancar kegiatan perdagangan, produksi dan jasa-jasa serta konsumsi yang semuanya meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Thomas Suyatno, H.A. Chalik, dkk (2007:14) berpendapat bahwa pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain:

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Bunga dan biaya administrasi kredit akan dibebankan kepada nasabah.

2. Pembantu usaha nasabah

3. Kredit juga juga berperan sebagai pembantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik investasi maupun modal kerja.

4. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank, maka semakin baik. Jika semakin banyak kredit berarti akan ada peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Keuntungan bagi pemerintah dari penyaluran kredit yaitu:

- a. Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank
- b. Membuka kesempatan kerja
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa
- d. Menghemat devisa negara
- e. Meningkatkan devisa negara

2.3.2. Jenis-jenis Kredit

Menurut ismail (2011;191) kredit berdasar kan jangka waktu nya terbagi tiga, yaitu :

a. Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek adalah kredit yang di berikan dengan masa kredit modal kerja dan kredit rekening koran.

b. Kredit jangka menengah

Kredit yang jangka waktu nya antara satu tahun hingga tiga tahun.

Kredit ini biasa nya di berikan untuk investasi yang nilai kredit nya tidak terlalu besar dan kredit konsumsi.

c. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang adalah kredit yang di berikan leh ban dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun. Kredit ini di brikan untuk KPR dan kredit investasi.

Ismail (2011;193) juga menyebutkan jenis kredit menurut tujuan penggunaannya terbagi tiga, yaitu:

a. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit yang di berikan dengan tujuan untuk mengadakan barang barang modal atau dalam rangka investasi perusahaan.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja di berikan oleh bank dalam rangka memberikan kebutuhan modal kerja perusahaan. Misalnya kebutuhan dana untuk menutupi piutang perusahaan atau kebutuhan dana untuk menutup penggunaan dana dalam proses pembuatan produk barang atau jasa.

c. Kredit konsumsi

Kredit konsumsi merupakan kredit yang di berikan dengan tujuan untuk pembelian barang barang konsumsi yang di pakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

2.3.3. Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2008;98) adalah sebagai berikut:

a. Debitur dan kreditur

Kedua pihak yang melakukan transaksi kredit yaitu debitur dan kreditur. Debitur disebut juga nasabah yaitu pihak yang mendapat pinjaman dari kreditur dan kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau menyalurkan pinjaman yaitu bank.

b. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

c. Kesepakatan

Setiap kredit yang di berikan oleh bank harus didasari ada nya perjanjian antara bank dan debitur berupa perjanjian kredit. Perjanjian

ini akan mengikat kedua pihak yaitu pihak bank dan debitur untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kredit

d. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

e. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan resiko kredit macet mungkin terjadi. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya, demikian juga sebaliknya.

f. Balas jasa

Suatu keuntungan atas pemberian jasa kredit yaitu yang dikenal dengan istilah bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bagi bank. Sedangkan untuk bank yang berbasis syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.3.4. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Sebelum Bank memberikan kredit pada nasabahnya, Bank harus mempertimbangkan apakah kredit yang diberikan akan tertagih atau tidak. Untuk itu, Bank perlu menilai beberapa aspek sebelum kredit diberikan. Kriteria penilaian yang dilakukan menurut Lukman (2009;89) yaitu penilaian dengan analisis 5C.

a. Character

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak orang yang akan diberikan kredit harus benar-benar dapat dipercaya. Untuk mengetahui sifat calon nasabah dapat diketahui dari latar belakang nasabah, baik pribadi maupun pekerjaannya seperti gaya hidup, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial si calon nasabah. Dari sifat atau watak tersebut dapat diketahui ukuran “kemauan” nasabah untuk membayar.

b. Capacity

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama mengelola usahanya sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. analisis Capital juga dapat dilihat dari sumber modal yang ada sekarang, termasuk persentase modal sendiri dan modal pinjaman.

d. Colleteral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit

yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. Condition

Dalam penilaian kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

2.3.5. Prosedur Dalam Pemberian Kredit

Secara umum prosedur pemberian kredit menurut Kasmir (2008;115) adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh bank. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisi antara lain:

1. Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan, serta relasinya dengan pihak pemerintah dan swasta.

2. Maksud dan tujuan

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan cabang/perusahaan baru atau tujuan lainnya.

3. Besarnya kredit dan jangka waktu

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktu dapat kita lihat dari cash flow serta laporan keuangan 3 tahun terakhir.

4. Cara memohon pengembalian kredit

Jelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.

5. Jaminan kredit

Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi semua resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit.

6. Akte notaris

Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT atau yayasan.

7. T.D.P (tanda daftar perusahaan)

8. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

9. Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir

10. Bukti diri dari pimpinan perusahaan

11. Fotocopy sertifikat jaminan

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar.

c. Wawancara awal

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon debitur, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang diinginkan oleh bank.

d. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I. Waktu pelaksanaan prosedur ini hendaknya tidak diberitahukan kepada nasabah.

e. Wawancara II

Wawancara II ini untuk perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan pada saat wawancara I dicocokkan dengan *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

f. Keputusan kredit

Keputusan kredit inilah yang akan menentukan apakah kredit diberikan atau ditolak. Biasanya keputusan kredit mencakup:

1. Jumlah uang yang diterima
2. Jangka waktu kredit
3. Biaya-biaya yang harus dibayar

Keputusan kredit merupakan keputusan team. Jika kredit ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan dengan alasannya masing-masing.

g. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu nasabah menandatangani akad kredit, megikat jaminan denagn hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

- a. Antara bank dengan debitur secara langsung
- b. Dengan melalui notaris

h. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

i. Penyaluran/penarikan dana

Yaitu pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu dengan cara sekaligus atau secara bertahap.

2.3.6. Kebijakan Kredit

Sebagai Suatu lembaga kredit, Bank harus menentukan *policy* atau kebijakan umum yang harus ditempuhnya baik kebijakan atau peraturan yang tertulis atau tidak tertulis.

Menurut Malayu (2005;93) dalam menetapkan kebijakan perkreditan maka ada 3 azaz pokok yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. *Azaz Likuiditas*, yaitu azaz yang mengharuskan bank untuk tetap menjaga tingkat likuiditasnya, karena salah satu bank yang tidak likuit maka akan berakibat hilangnya kepercayaan para nasabahnya atau masyarakat luas.
- b. *Azaz Solvabilitas*, usaha pokok perbankan adalah menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan melalui kredit. Bank haruslah berhati-hati mengatur penanaman dana tersebut, baik pada bidang perkreditan, surat berharga maupun bidang lainnya.
- c. *Azaz Rentabilitas*, seperti halnya pada setiap usaha akan selalu mengharapkan untuk mendapatkan laba. Laba yang akan diperoleh dari perkreditan berupa selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang diterima debitur.

Kebijakan kredit dimaksudkan sebagai komponen yang mengatur perihal perkreditan baik prosedur, jumlah kredit yang diberikan maupun jangka waktu dan tingkat bunga kredit yang disusun dan dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan perkreditan.

2.3.7. Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit merupakan proses penilaian dan pemantauan kredit sejak analisis agar dapat berjalan sesuai dengan rencana kredit. Pengawasan kredit dapat dibedakan menjadi: (Lukman; 2009;79)

a. *Prepentif Control*

Merupakan pengawasan kredit yang dilakukan sebelum pencairan kredit dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan terjadi penyimpangan penggunaan kredit.

b. *Represif Control*

Merupakan pengawasan kredit yang dilakukan setelah pencairan dan saat penggunaan dengan tujuan untuk mengatasi setiap penyimpangan yang terjadi.

Menurut Sutejo (Lukman;2009;79) untuk menghindari kasus kredit bermasalah bank harus melakukan pengawasan kredit, antara lain secara periodik mengaudit perkembangan usaha debitur dan kondisi keuangan pada debitur.

Dengan melakukan pengawasan kredit secara periodik pihak bank akan mampu mendeteksi apabila muncul tanda-tanda debitur mengalami kesulitan usaha baik kondisi keuangan ataupun masalah lain, sejak dini bank dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan debitur tersebut.

2.4. Efektivitas

Keberhasilan dan kepemimpinan seringkali diukur dengan konsep efektivitas. Walaupun banyak orang setuju bahwa manajemen berperan dalam mencapai efektivitas organisasi, tetapi sulit memperinci apa yang dimaksud konsep efektivitas. Menurut Bayangkara, IBK (2008;197), pengertian efektivitas yaitu:

“Efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya.”

Selain itu Agoes dalam Sukrisno dan Hoesada (2009;156) mengartikan Efektifitas sebagai perbandingan masukan-keluaran dalam berbagai kegiatan, sampai dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan, baik ditinjau dari kuantitas (*volume*) hasil kerja, kualitas hasil kerja, maupun batas waktu yang ditargetkan.

2.5. Efektivitas Kegiatan Perkreditan

Secara umum dapat dikatakan bahwa efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan. Jadi sebenarnya efektivitas berhubungan dengan hasil operasi. Demikian juga dengan efektivitas kegiatan perkreditan di bank. Jika kita ingin untuk menilai efektivitas kegiatan perkreditan, maka kita dapat menilai apakah pelaksanaan kredit tersebut telah mencapai sasaran tertentu.

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan asset bank yang berisiko karena dimiliki oleh pihak luar yaitu debitur. Dalam upaya untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan perkreditan yang dijalankan bank maka bank harus menjamin bahwa kegiatan perkreditan telah berjalan dengan efektif

dimana manajemen telah mampu mencapai sasaran kredit yaitu peningkatan tingkat kolektibilitas kredit (*performance loan*) dan penurunan jumlah kredit bermasalah kolektibilitas kredit (*performance loan*) dan penurunan jumlah kredit bermasalah (*non performance loan*).

Menurut Gatot (2009;269) ada beberapa faktor penyebab kredit bermasalah yang berasal dari intern bank yaitu :

1. Analisis yang dilakukan oleh pejabat bank yang kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit
2. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dengan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan
3. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis kredit dengan tepat dan akurat
4. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait misalnya Komisaris, Direktur Utama Bank sehingga petugas tidak dapat independent dalam memutuskan kredit
5. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat kredit bermasalah sangat dipengaruhi oleh keefektifan kegiatan perkreditan yang dijalankan bank, sehingga tingkat kredit bermasalah dapat digunakan sebagai alat analisa dalam menilai keefektifan kegiatan perkreditan.

Kualitas kredit menurut Peraturan Bank Indonesia No.9/6/PBI/2007

Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yaitu :

1. Lancar, merupakan pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
2. Dalam Perhatian Khusus, dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari.
3. Kurang lancar, dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
4. Diragukan, dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari
5. Macet, dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga melampaui 270 hari

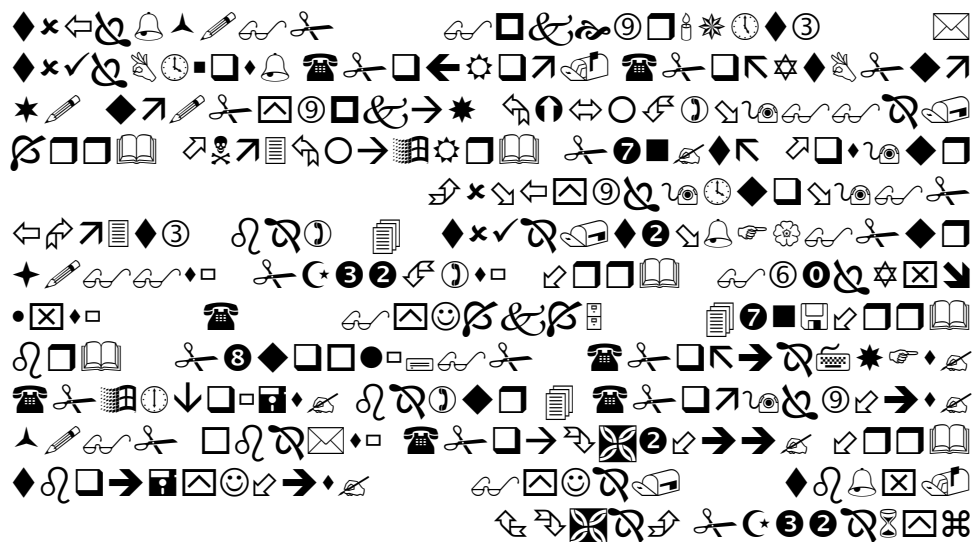
Non Performing Loan (NPL) merupakan kredit bermasalah yaitu kredit yang masuk ke dalam kategori Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Besarnya rasio NPL suatu Bank ditentukan oleh kolektibilitas kreditnya karena rasio NPL adalah perbandingan antara kredit yang tidak lancar/bermasalah dengan jumlah kredit yang diberikan. Semakin rendah rasio NPL berarti semakin baik kualitas NPL. Jika kredit yang diberikan betul-betul tepat sasaran dan tepat guna, maka efektivitas kegiatan perkreditan akan tercapai dengan kata lain NPL yang dicapai akan rendah yaitu di bawah standar maksimal, yaitu 5%.

Proses perkreditan yang baik diharapkan dapat menekan NPL sekecil mungkin. Tingkat NPL sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam

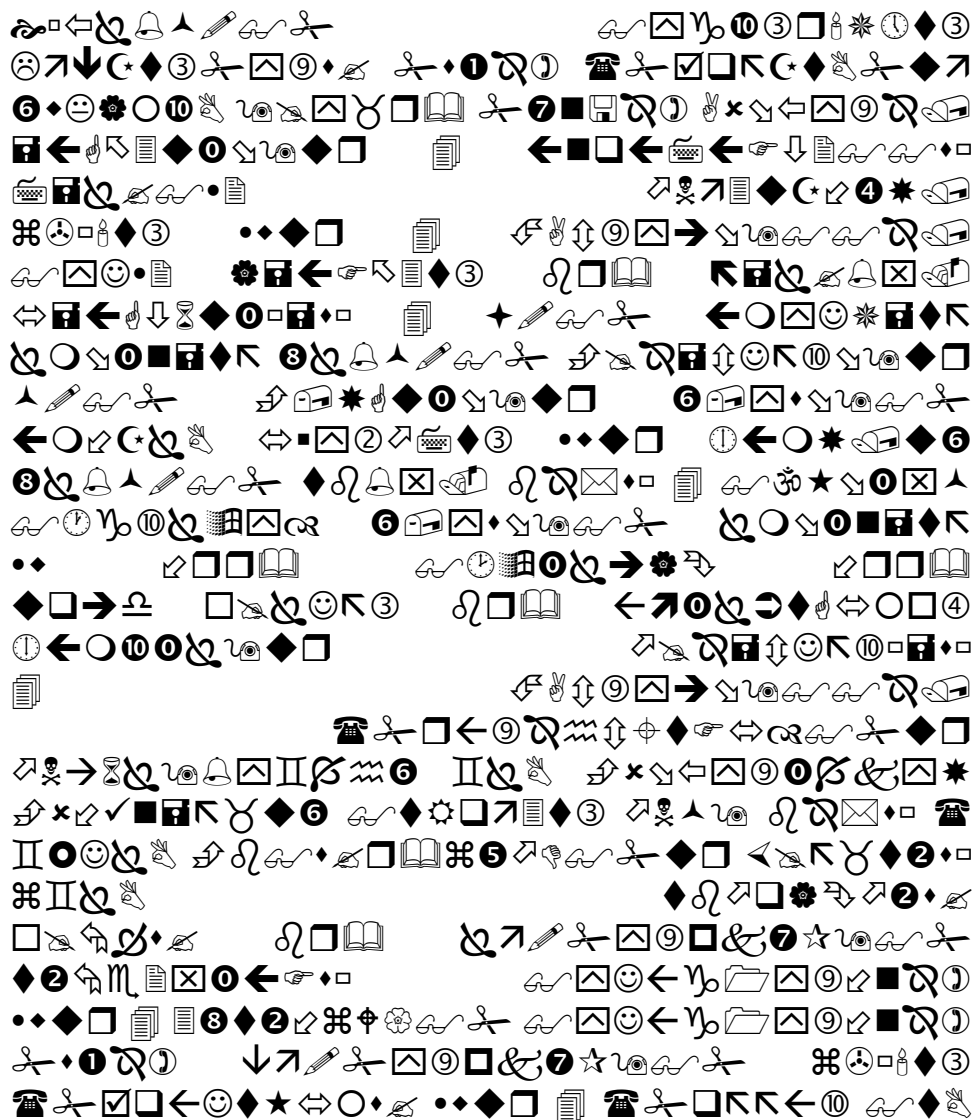
menjalankan kegiatan perkreditan dengan baik, yaitu kegiatan pemberian kredit, administrasi dan pelaporan termasuk tindakan pemantauan (*monitoring*) setelah kredit disalurkan dan tindakan pengendalian bila terdapat indikasi penyimpangan kredit maupun indikasi gagal bayar.

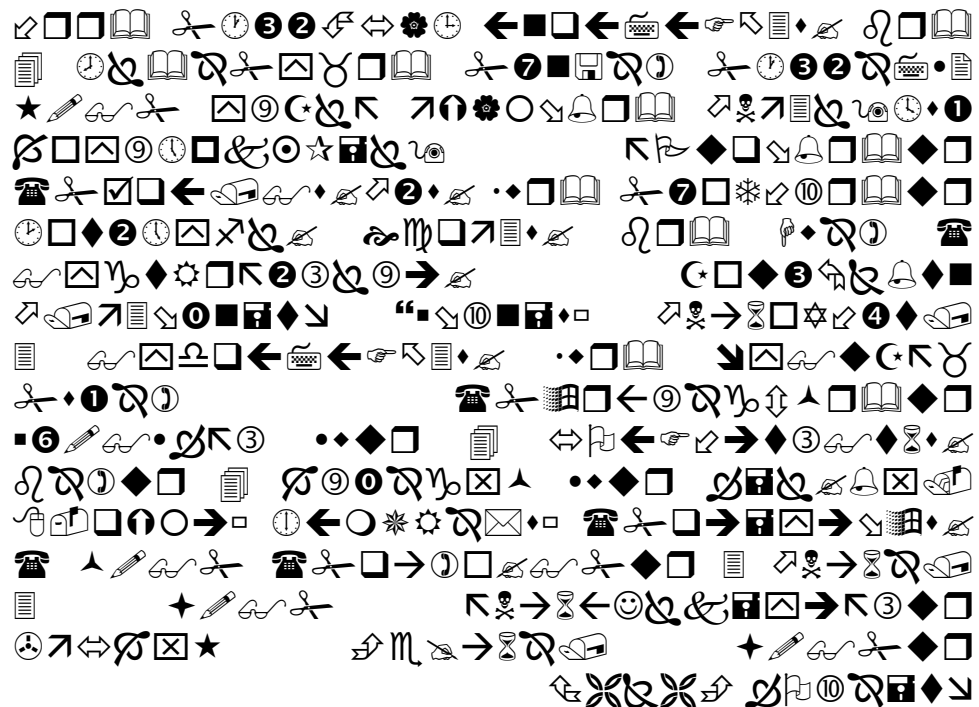
2.6. Pandangan Islam terhadap Audit dan Kredit

Seorang Auditor haruslah independen dalam melaksanakan tugasnya agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Hal ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 135 yaitu Allah SWT berfirman:



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa’;135)





Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan

janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah;282)

2.7 Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian terhadap Peranan Audit operasional ini, penulis telah membaca penelitian terdahulu mengenai hal yang sama. Nurul Wulandari (2011) telah melakukan penelitian tentang pengaruh audit operasional dalam meningkatkan efektifitas kegiatan produksi dan hasilnya ternyata audit operasional tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan efektifitas produksi. Hal ini terjadi karena karyawan kurang meyakini dan kurang mendukung kegiatan audit operasional yang seharusnya dapat meningkatkan efektifitas produksi perusahaan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan Pada BPR Rokan Hulu di Pasir Pangaraian yang dimulai dari 25 Maret 2013 sampai pada tanggal 20 Agustus 2013.

1.2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Yaitu data mentah yang diperoleh dalam bentuk yang belum jadi dan masih memerlukan adanya pengolahan yang diperoleh peneliti melalui wawancara langsung dengan staf perusahaan yang berwenang.

b. Data Sekunder

Yaitu data-data yang diperoleh dalam bentuk yang telah jadi, yaitu kredit yang diberikan selama 3 tahun terakhir, data kredit macet, prosedur pemberian kredit, struktur organisasi, dan sejarah singkat BPR Rokan Hulu.

1.3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan penulis pada penelitian ini adalah:

- a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait dan wawancara ini dilakukan untuk mendukung data primer.

- b. Dokumentasi yaitu data-data yang diperoleh langsung dari bagian kredit di BPR Rokan Hulu seperti data kredit yang diberikan selama 3 tahun terakhir, prosedur pemberian kredit, sejarah singkat perusahaan.

1.4. Analisis Data

Untuk mendapatkan gambaran tentang masalah yang diteliti, penulis menganalisa dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menganalisa data dengan menelaah dan membandingkan dengan berbagai teori yang relevan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dan selanjutnya dapat diambil keputusan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM BPR ROKAN HULU

1.1. Sejarah singkat BPR Rokan Hulu

BPR Rokan Hulu berada di Jl. Tuanku Tambusai, Komplek Pasar Modern Kampung Padang Pasir Pangaraian ROKAN HULU-RIAU, Bank ini belum memiliki jaringan di tempat lain. Namun demikian BPR Rokan Hulu terus berupaya untuk menjadi BRP terbaik di Propinsi Riau pada tahun 2017 sesuai dengan misinya yang ingin menjadi BPR terbaik di Riau ini.

BPR Rokan Hulu didirikan pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 03 tahun 2007. Selain itu, pertimbangan lain pendirian BPR ini adalah berdasarkan keputusan Bank Indonesia yang mengeluarkan surat Keputusan dengan nomor 8/348/DPBPR tanggal 10 juli 2006 tentang persetujuan prinsip pendirian PD. BPR Rokan Hulu dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 9/33/KEP.GBI/DP9/2007 tentang pemberian izin usaha pada PD. BPR Rokan Hulu. Sejak saat itulah BPR Rokan Hulu berdiri hingga sekarang sudah berusia 6 tahun.

BPR Rokan Hulu masih terbilang baru, Permodalan BPR Rokan Hulu pun 100% masih dimiliki oleh pemerintah Kab. Rokan Hulu dengan total Modal Dasar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Modal yang sudah disetorkan oleh pemerintah Rokan Hulu msementara baru sebesar Rp. 8.300.000.000,- (*Delapan milyar tiga ratus juta rupiah*). Sedangkan Modal

yang belum disetor sebesar Rp. 1.700.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

Produk yang ditawarkan oleh Bank Umum tidak sama dengan produk yang ada dalam BPR. Bank Umum bisa melakukan semua kegiatan perbankan, sedangkan BPR lalu lintas pembayarannya masih terbatas. Seperti pada BPR Rokan Hulu yang memiliki beberapa produk, yaitu tabungan, deposito, dan kredit. Tabungan yang ditawarkan oleh BPR Rokan Hulu yaitu SINERGI (Simpanan Anak Negeri), Simpanan PRO (Simpanan Pemerintah Rokan Hulu) dan TABUNGANKU. Namun dalam hal produk Deposito, BPR Rokan Hulu hanya menawarkan Deposito jangka pendek yaitu dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan sementara deposito jangka panjang tidak disediakan pada BPR Rokan Hulu.

Produk utama yang juga ditawarkan oleh BPR Rokan Hulu adalah produk Kredit, sesuai namanya Bank ini memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan memberikan kredit Modal Kerja yaitu Kredit Wirausaha, Kredit Bakulan, dan Kredit Agrobisnis. Selain itu, BPR Rokan Hulu juga memberikan kredit Konsumtif yang diberikan pada masyarakat atau pegawai. Kredit ini dibagi dalam tiga kategori, yaitu Kredit Karyawan, Kredit Non Karyawan, dan Kredit Anggota Koperasi.

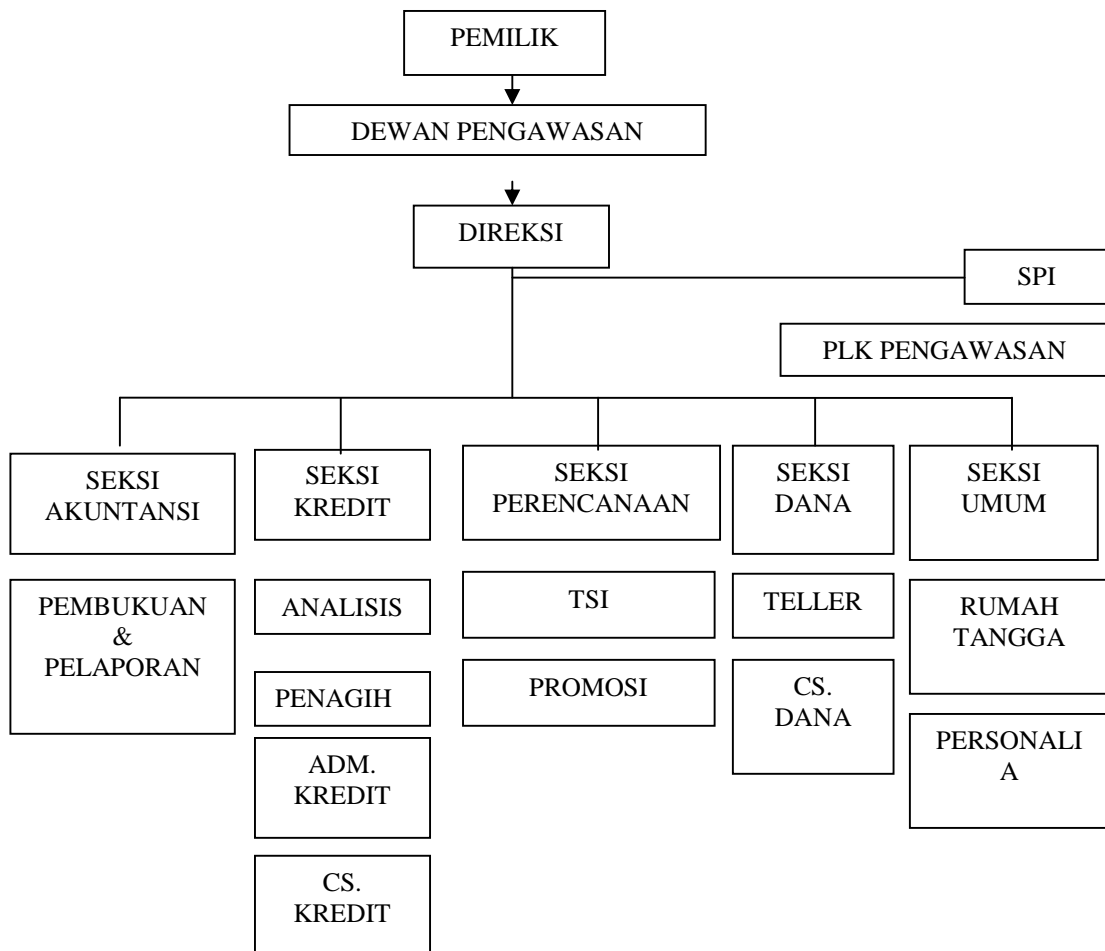
Sumber daya manusia yang ada dalam BPR Rokan Hulu sudah memadai, dalam BPR ini ada pegawai tetap dan ada juga pegawai Kontrak/Honorar. pegawai tetap yang ada di BPR ini terdiri dari 20 orang yang terdiri dari 15 orang karyawan dan 5 orang karyawan. Mereka berasal

dari berbagai tingkatan pendidikan. Mulai dari tingkatan SLTP sampai tingkat sarjana.

Struktur organisasi yang ada dalam BPR Rokan Hulu akan digambarkan pada bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar IV.1

STRUKTUR ORGANISASI BPR ROKAN HULU



Sumber: BPR Rokan Hulu

1.2. Prosedur Pemberian Kredit pada BPR Rokan Hulu

1.2.1. Proses Kredit Baru

1. Tahap permohonan kredit

- a) Mengisi formulir permohonan kredit secara lengkap dan melengkapi data identitas, kegiatan usaha, keuangan dan agunan.
 - b) Pengecekan awal dan memverifikasi data yang diterima dari calon nasabah tidak terdapat kejanggalan serta mengecek barang jaminan yang diberikan.
2. Analisis kredit mengecek ulang data dari nasabah, mewawancarai calon nasabah dan mengunjungi tempat usaha dan jaminan nasabah yang dituangkan dalam laporan kunjungan usaha.
 3. Analisis kredit membuat memorandum usulan kredit (MUK) atau proposal kredit dengan melampirkan dokumen pendukung dengan ditandatangani oleh pihak terkait sebelum diajukan kepada komite kredit.
 4. Proposal kredit dan MUK diajukan kepada komite kredit untuk pengambilan keputusan apakah usulan kredit disetujui atau ditolak
 5. CS kredit memberikan informasi penerimaan atau penolakan kredit kepada calon debitur. Jika disetujui maka kredit akan direalisasikan dan debitur harus membawa dokumen-dokumen asli yang dibutuhkan serta syarat lain yang berkaitan dengan realisasi kredit.
 6. Adm. Kredit membuat perjanjian kredit dan jaminan kredit dengan calon debitur dihadapan pejabat yang diberi kuasa oleh direksi yang kemudian dibuat formulir Persetujuan Pembekuan Kredit (PPK) dan didistribusikan kepada bagian yang terkait.

7. Adm. Kredit menyimpan data dan mengimput data untuk realisasi kredit dan bagian dana mencairkan kredit berdasarkan promes atau media lain dari Adm. Kredit.
8. Adm. Kredit mengarsip dokumen-dokumen kredit dan mengecek ulang sekurang-kurangnya 6 bulan sekali.
9. Pengawasan kredit
 - a) Analisis kredit memantau berjalannya kredit dan membuat surat peringatan atau teguran jika terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak Bank dan pihak debitur atau nasabah.
 - b) Penagihan kredit membuat laporan perjanjian kredit, laporan bulanan pinjaman dan membuat kliping media cetak apabila terdapat berita negatif mengenai nasabah.

1.2.2. Perpanjangan Kredit

Untuk memperpanjang fasilitas kredit tahapan yang dilakukan sama dengan proses pengajuan kredit yang baru namun bag. Analisa kredit memfokuskan perhatiannya kepada perkembangan usaha dan kondisi keuangan nasabah setelah diberikan fasilitas kredit untuk memastikan agar kredit tetap berjalan efektif.

1.2.3. Pelunasan Kredit Sebelum Jatuh Tempo

Pelunasan kredit sebelum jatuh tempo telah diatur secara tersendiri berdasarkan keputusan direksi BPR Rokan Hulu

1.2.4. Perubahan Fasilitas Atau Jaminan Kredit

Setiap perubahan fasilitas atau jaminan kredit harus diajukan secara tertulis oleh petugas terkait kepada direksi tau komisaris Bank sesuai wewenangn kredit berdasarkan ketentuan yang diatur dalam keputusan direksi dan ketentuan lainnya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1. Pelaksana Audit Operasional

Audit operasional pada BPR Rokan Hulu dilaksanakan oleh auditor internal yang disebut sebagai bagian SPI (Satuan Pengawas Intern) pada bank ini, dalam struktur organisasi SPI berada dibawah Direksi dan diatas seksi atau bagian-bagian lain. Posisi SPI yang tinggi membuat SPI dapat melakukan pengawasan secara leluasa terhadap kegiatan operasional bank dan mempertanggungjawabkan hasil pengawasan yang dilakukan kepada direksi dan dewan pengawas.

SPI merupakan perpanjangan tangan dari dewan pengawas dan direksi untuk melaksanakan pengawasan pada BPR Rokan Hulu karena dewan pengawas atau direksi tidak terjun langsung dalam operasional Bank. Tugas pokok dari SPI BPR Rokan Hulu adalah untuk memastikan bahwa kegiatan operasional pada BPR Rokan Hulu telah berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Jika dilihat dari Standar Praktik Profesi Audit Internal SPI BPR Rokan Hulu selaku auditor internal secara umum telah melakukan audit sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh standar tersebut. Hal ini dilihat dari SPI selalu berkomitmen dalam mengembangkan kompetensinya sebagai auditor internal walaupun dilihat dari jenjang pendidikan pihak terkait tidak sesuai dengan bidangnya. Namun demikian SPI tetap mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan komepetensinya sebagai auditor baik

didalam maupun diluar kota. SPI mengikuti berbagai program pelatihan seperti : Loka Karya, Money Laundering dan Teknik Pelacakan, Psikologi dan Komunikasi dalam Audit, Dasar-dasar Investigasi Bagi Satuan Pengawasan Intern dan Program Pendidikan Profesi Berjenjang yang diselenggarakan oleh YPAI (Yayasan Pendidikan Auditor Internal) dengan tingkatan Dasar-Dasar 1, Dasar-Dasar Audit 2, Lanjutan 1, Lanjutan 2, dan Manajerial.

Auditor internal atau SPI pada BPR Rokan Hulu juga memiliki sikap yang independen dalam mengaudit. SPI tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan karyawan atau pimpinan Bank dan auditor bebas dari campur tangan pihak lain dalam melaksanakan audit sehingga auditor bisa bekerja secara independen tanpa tekanan dari pihak manapun dan tidak memihak siapapun.

Perencanaan audit dan audit program juga dilakukan oleh SPI walaupun audit program yang disusun belum terinci sebagaimana mestinya. SPI tetap membuat program audit tahunan atau audit rutin. Pelaksanaan audit dilakukan berdasarkan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan audit program yang telah disusun.

Auditor atau SPI mengkomunikasikan hasil audit dengan segera kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang meminta audit yaitu dalam *exit meeting* dan membuat Laporan Hasil Audit (LHA). Selain itu SPI juga meminta pihak auditee untuk segera memperbaiki temuan yang dilaporkan dengan memberikan batas waktu perbaikan. Auditor juga mengawasi kemajuan tindak lanjut terhadap temuan audit yang dilakukan oleh manajemen

objek yang diaudit dan memastikan bahwa tindakan manajemen telah dilaksanakan secara efektif.

Audit Operasional terhadap kredit juga dilakukan oleh SPI sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

1.2. Pemeriksaan Kredit

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada pada BPR Rokan Hulu hal-hal yang perlu diperiksa dalam pemeriksaan kredit adalah:

1. Proses kredit (*credit processing*)

Untuk memastikan bahwa proses kredit telah dilaksanakan berdasarkan SOP atau ketentuan yang berlaku

2. Kebijakan kredit

a) Prinsip kehati-hatian

Bank wajib melakukan analisis yang mendalam (itikad dan kemampuan) calon debitur, menerapkan ketentuan secara konsisten dan membuat ketentuan untuk mengelola resiko pemberian kredit.

b) Organisasi dan mamajemen perkreditan

Memisahkan unit marketing dan bisnis dengan *risk management* untuk menghindari terjadinya *conflict of interest*

c) Manejemen resiko

Credit risk adalah kredit yang diberikan tidak dapat ditarik kembali.

Market risk adalah resiko yang disebabkan oleh harga pasar dan instrument keuangan (kurs, suku bunga, harga saham dan lain-lain).

Operational risk adalah resiko yang disebabkan oleh kegagalan suatu proses atau lemahnya pengawasan atau tidak patuh dengan ketentuan.

Country risk adalah resiko yang disebabkan kondisi yang tidak baik dari suatu negara.

3. Kebijakan Persetujuan Kredit

Pemberian kredit harus didasarkan atas permohonan tertulis dari calon debitur, data/informasi evaluasi harus menggambarkan kondisi atau potensi 5c dari calon debitur dan keputusan pemberian kredit harus didasarkan pada hasil evaluasi yang dibuat secara tertulis.

4. Dokumentasi dan Administrasi Kredit

Dokumen harus dipisahkan antara legal file dan nonlegal file.

5. Pengawasan kredit

Fungsi pengawasan merupakan tanggungjawab setiap tingkat manajemen yang harus mengupayakan pencegahan secara dini dan harus tercermin dalam struktur pengendalian intern. Pengawasan terhadap kredit yang beresiko tinggi harus lebih intensif dan meliputi review internal oleh unit kerja terpisah.

6. Penyelesaian kredit bermasalah

Membentuk tim tugas khusus untuk menyelesaikan kredit bermasalah.

1.3. Tujuan Audit Kredit

1. Pedoman telah mendukung pengelolaan kredit
2. Sumber daya yang ada mendukung penanganan kredit yang sehat
3. Kebijakan perkreditan telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pengelolaan kredit

4. Anggaran cukup realistis
5. Proses pemberian kredit telah sesuai dan wajar
6. Monitoring kredit telah dilakukan dengan baik
7. Penetapan kolektabilitas dan pembentukan PPAP sesuai
8. Penyelesaian kredit bermasalah telah dilaksanakan dengan baik
9. Jumlah kredit yang disalurkan tidak melampaui BMPK
10. Pelaporan dan pembukuan telah sesuai dan tepat waktu

1.4. Pelaksanaan Audit Operasional Kredit

BPR Rokan Hulu melaksanakan audit berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB). Pelaksanaan audit kredit pada BPR Rokan Hulu dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1.4.1. Tahap Persiapan

Langkah-langkah yang dilakukan auditor internal (SPI) BPR Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

1.4.1.1. Metode Pendekatan

Auditor intern memeriksa kredit dengan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dan menetapkan konsep materialitas.

1.4.1.2. Penetapan Penugasan

Penetapan penugasan digunakan untuk memberitahukan auditor sebagai dasar melakukan audit yang telah ditetapkan dalam rencana audit tahunan. Penetapan penugasan disampaikan oleh Dewan Pengawas dalam bentuk surat penugasan yang berisi tentang penetapan ketua dan anggota tim audit, waktu serta tujuan audit (Daeng;2006;52).

Pada BPR Rokan Hulu audit yang bersifat rutin tidak menggunakan surat penugasan yaitu audit yang dilakukan setiap tiga bulan sekali namun audit yang bersifat kondisional atau audit tahunan, SPI menggunakan surat penugasan. Surat penugasan tersebut bersisi tentang penugasan audit oleh direksi untuk mengaudit hal-hal yang perlu diaudit.

1.4.1.3. Pemberitahuan Audit

SPI membawa surat pemberitahuan untuk audit yang bersifat rutin namun audit yang bersifat inspeksi atau kondisional tidak menggunakan surat pemberitahuan untuk menjaga hasil dari audit yang dilakukan. SPI membawa surat pemberitahuan audit dari Dewan Pengawas yang disampaikan kepada bagian kredit pada BPR Rokan Hulu. Dalam surat pemberitahuan dikemukakan:

- a. Penegasan wewenang SPI untuk melakukan audit kredit
- b. Menunjukkan susunan ketua dan anggota tim audit kepada bagian kredit yang akan diaudit
- c. Mengenai tujuan dan waktu dan hal-hal yang akan diaudit
- d. Meminta auditee atau bagian kredit untuk menyiapkan informasi dan data yang diperlukan selama audit dilakukan

1.4.1.4. Penelitian Pendahuluan

penelitian pendahuluan dilakukan oleh tim audit pada bagian kredit secara terus-menerus untuk memahami setiap kegiatan yang dilakukan oleh bagian kredit BPR Rokan Hulu secara umum agar

auditor dapat merumuskan tujuan audit dengan jelas. Hasil analisis penelitian pendahuluan dijadikan sebagai dasar penyusunan program audit kredit dan hasil dari analisis penelitian pendahuluan didokumentasikan oleh auditor dalam arsip permanen.

1.4.2. Penyusunan Program

SPI menyusun audit program yaitu program tahunan untuk audit yang bersifat rutin. Program audit (Daeng; 2006;53) adalah dokumentasi prosedur bagi *auditor intern* dalam mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan mendokumentasikan informasi selama pelaksanaan audit, termasuk catatan untuk pemeriksaan yang akan datang.

Menurut Daeng (2006;54) Program audit secara umum harus meliputi:

- a. Merupakan dokumentasi prosedur bagi auditor intern dalam mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan mendokumentasikan informasi selama pelaksanaan audit, termasuk catatan untuk pemeriksaan yang akan datang.
- b. Menyatakan tujuan audit.

Tujuan Audit kredit BPR Rokan Hulu menurut SPI adalah untuk memastikan bahwa kredit telah dijalankan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku seperti telah dijelaskan pada poin 5.3 diatas.

- c. Menetapkan luas, tingkat dan metodologi pengujian yang diperlukan guna mencapai tujuan audit untuk tiap tahapan audit.

SPI BPR Rokan Hulu menggunakan metode sampel secara acak atau menggunakan data misalnya data kredit bulan agustus dalam melakukan audit, luas lingkup audit yaitu mencakup semua jenis kredit.

d. Menetapkan jangka waktu pemeriksaan

SPI menetapkan waktu audit tergantung pada resiko ataupun permasalahan yang dihadapi didalam melakukan audit, jika diperlukan waktu tambahan maka hal itu akan dilakukan.

e. Mengidentifikasi aspek-aspek teknis, resiko, proses dan transaksi yang harus diuji, termasuk pengolahan data elektronik.

1.4.3. Pelaksanaan Penugasan

Menurut Daeng (2006;54) tahap pelaksanaan audit meliputi kegiatan mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, mendokumentasi bukti-bukti audit serta informasi lain yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang diigarisikan dalam program audit untuk mendukung hasil audit.

1.4.3.1. Uji Pengendalian

Menurut SPI, audit kredit dilakukan untuk memastikan agar kredit berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Reveiw atau uji pengendalian jarang dilakukan. Hal ini akan dilakukan jika ada suatu hal yang membutuhkan konfirmasi karena audit dilakukan dengan mereview hasil audit terdahulu sehingga uji pengendalian jarang dilakukan.

Uji pengendalian yang dilakukan yaitu meliputi:

1. Organisasi

Auditor internal melakukan pengujian terhadap organisasi kredit apakah setiap anggota organisasi telah melakukan perannya sesuai wewenang jabatannya dibagian kredit yang akan diaudit.

2. Manajemen SDM kredit dan implementasi kredit

Auditor melakukan pengujian apakah manajemen SDM kredit efektif, implementasi kredit telah tepat sasaran, pengelolaan kredit serta aset-aset yang dilontarkan dalam bentuk kredit dikelola dan dikendalikan dengan baik.

1.4.3.2.Pemeriksaan Pengelolaan kredit

1. Audit Perencanaan Kredit dan Varian

Pada tahap ini Auditor internal atau SPI melakukan prosedur Audit:

- a) Interview mengenai informasi perencanaan kredit, dukungan manajemen, strategi dan sumber daya
- b) Analisa kewajaran perencanaan, strategi pencapaian anggaran, dukungan sumber daya yang dimiliki
- c) Verifikasi apakah ada action plan
- d) Bandingkan dan analisa varian anggaran
- e) Interview mengapa terjadi varian
- f) Lakukan wawancara apabila terdapat penyimpangan

2. Proses Pemberian Kredit

A. Tahap Investigasi

Untuk mengaudit tahap investigasi, auditor atau SPI membuat prosedur audit sebagai berikut:

- 1) Interview cara memperoleh informasi mengenai debitur, prosedur penanganan permohonan debitur
- 2) Verifikasi mengenai legalitas dan perizinan debitur, kepengurusan perusahaan, informasi bank, laporan debitur, agunan, laporan-laporan konsultan atau profesional lainnya.
- 3) Verifikasi bukti penelitian pendahuluan dan bandingkan dengan data lain
- 4) Lakukan cross cheking informasi atau data kepada pihak lain
- 5) Lakukan wawancara apabila terdapat penyimpangan

B. Tahap Analisa

Prosedur Audit yang ditetapkan oleh SPI pada tahap analisa kredit ini adalah:

- 1) Interview prosedur analisa dan cara memperoleh data dan dalil/dasar yang digunakan
- 2) Verifikasi proses analisa per aspek
- 3) Verifikasi dan analisis kembali kewajaran cash flow
- 4) Verifikasi dan analisa kembali kewajaran perhitungan kebutuhan serta kredit yang diusulkan

- 5) Verifikasi dan analisa jadwal pencairan, pelunasan serta penetapan persyaratan lainnya
- 6) Verifikasi dan analisa penetapan nilai agunan dan pengamanan lainnya yang ditetapkan
- 7) Wawancara apabila terdapat penyimpangan

C. Tahap proses pengambilan keputusan

- 1) menginterview proses pengambilan keputusan, keputusan penetapan keanggotaan dan kewenangan komite audit serta manajemen pengambilan keputusan.
- 2) memverifikasi keputusan kredit apakah telah sesuai dengan ketentuan, tidak melampaui wewenang dan BMPK.
- 3) membandingkan batas maksimum keputusan dengan realisasi keputusan
- 4) melakukan wawancara jika terdapat penyimpangan.

D. Tahap Pencairan

- 1) menginterview prosedur dalam melakukan pencairan kredit
- 2) membandingkan persyaratan sesuai *check list* persyaratan dengan nota persetujuan pencairan.
- 3) memverifikasi perjanjian kredit dan dokumen persyaratan, agunan yang diikat, setiap pencairan memiliki permohonan tertulis dari debitur dan semua syarat telah dipenuhi, bukti keuangan nasabah
- 4) wawancara jika terdapat penyimpangan.

3. Audit Monitoring Kredit

A. Pemenuhan Persyaratan Umum

Prosedur audit yang dilakukan SPI selaku audit internal BPR Rokan Hulu adalah:

- 1) Interview langkah yang dilakukan untuk memonitor persyaratan umum.
- 2) Verifikasi apakah laporan telah diserahkan oleh debitur tepat waktu dan telah diadministrasi dengan baik
- 3) Verifikasi apakah laporan tersebut telah dilakukan analisa dan informasi kredit bermasalah telah ditindaklanjuti
- 4) Verifikasi apakah laporan konsultan telah diterima dan telah dilakukan analisa serta telah ditindaklanjuti
- 5) Melakukan analisa ulang atas laporan debitur dan laporan konsultan
- 6) Verifikasi bank of bank information dan informasi ke media massa
- 7) Bandingkan pencairan, pelunasan, dengan schedule
- 8) Lakukan wawancara apabila terdapat penyimpangan

B. *On The Spot*

Prosedur audit *on the spot* pada BPR Rokan Hulu adalah:

- 1) Interview apakah rencana *on the spot* telah disusun sesuai dasar penyusunannya
- 2) Verifikasi realisasi *on the spot* dan bandingkan dengan rencana

- 3) Verifikasi laporan on the spot dan tindak lanjutnya
- 4) Lakukan pemeriksaan apabila terjadi penyimpangan

C. Agunan

SPI melakukan audit agunan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Interview pengelolaan agunan
- 2) Bandingkan daftar agunan dengan asli fisikbukti agunan
- 3) Interview dan observasi tempat penyimpanan
- 4) Konfirmasi cover notes kepada otaris
- 5) Verifikasi bukti pembayaran pada buku besar
- 6) Interview/verifikasi usaha-usaha yang dilakukan untuk meyakini keabsahan dan pemamfaatan lokasi agunan dari tata kota/ camat/bpn
- 7) Verifikasi SHGU/SHGB yang telah jatuh tempo dan tindak lanjutnya
- 8) Verifikasi persetujuan penggantian jaminan
- 9) Verifikasi penilaian ulang agunan
- 10) Lakukan wawancara apabila terjadi penyimpangan

D. Asuransi

Prosedur audit Asuransi:

- 1) Interview proses penanganan asuransi
- 2) Bandingkan daftar agunan yang insurabel dengan daftar polis
- 3) Verifikasi kewajaran nilai pertanggungan
- 4) Verifikasi klausula dalam polis

- 5) Verifikasi polis yang telah jatuh tempo
- 6) Lakukan wawancara apabila terdapat penyimpangan

E. Laporan Perkreditan

SPI melakukan audit laporan perkreditan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Interview mengenai proses penyusunan laporan
- 2) Verifikasi laporan kredit dengan laporan lainnya
- 3) Chek kewajaran pendapatan bunga dengan cara membandingkan total rata-rat baki debit kredit
- 4) Chek list penyampaian laporan
- 5) Lakukan wawancara apabila terdapat penyimpangan

F. Penilaian Ulang

Prosedur audit yang dilakukan SPI atau auditor internal BPR Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

- 1) Interview prosedur/ proses penilaian ulang
- 2) Lakukan penilaian apakah unit kerja yang melakukan penilaian ulang cukup baik
- 3) Verifikasi metode penilaian ulang apakah dapat mendeteksi kemungkinan kredit bermasalah
- 4) Verifikasi metode penilaian ulang apakah telah ditindaklanjuti
- 5) Verifikasi monitoring atas tindak lanjut

G. Pelunasan Kredit

SPI melakukan audit pelunasan kredit dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Interview prosedur penanganan pelunasan kredit
- 2) Verifikasi bukti permohonan pelunasan, berita acara penyerahan dokumen, perhitungan kewajiban debitur
- 3) Bandingkan jumlah yang disetor debitur dengan total kewajibannya
- 4) Verifikasi dokumen pelunasan kredit dengan baik dan terpisah dengan dokumen kredit yang masih aktif
- 5) Lakukan wawancara apabila terdapat penyimpangan

H. Penanganan Kredit Bermasalah

SPI melakukan prosedur audit untuk mengaudit penanganan kredit bermasalah sebagai berikut:

- 1) Interview kebijakan dan prosedur penanganan kredit bermasalah
- 2) Lakukan penilaian apakah unit kerja yang menangani kredit bermasalah mempunyai SDM yang cukup
- 3) Verifikasi program penyelesaian kredit disusun secara realistis
- 4) Verifikasi langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian kredit bermasalah
- 5) Verifikasi penyelesaian kredit bermasalah per-debitur

- 6) Verifikasi analisa pemberian keringanan
- 7) Bandingkan keputusan pemberian keringanan dengan realisasinya
- 8) Verifikasi program penagihan kredit macet dan realisasinya serta pertanggungjawabannya
- 9) Lakukan wawancara apabila terdapat penyimpangan

I. Dokumentasi Kredit

Prosedur audit untuk mengaudit dokumentasi kredit yang disusun SPI adalah sebagai berikut:

- 1) Interview sistem pengelolaan dokumen
- 2) Verifikasi apakah daftar dokumen memudahkan untuk mencari dokumen yang dibutuhkan
- 3) *Test check* apakah dapat dengan mudah mencari dokumen
- 4) Verifikasi kelengkapan dokumen dan penyusunannya dalam satu berkas disertai dengan daftar isi
- 5) Bandingkan daftar isi dengan dokumennya
- 6) Verifikasi apakah dokumen sertifikat perjanjian kredit disimpan terpisah dengan dokumen lainnya
- 7) Verifikasi peminjaman dokumen dan pengembaliannya
- 8) Observasi tempat penyimpanan dookumen telah aman
- 9) Lakukan wawancara apabila terjadi penyiimpangan

J. Pembukuan

SPI melakukan audit pembukuan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Interview system pembukuan dan control yang dilakukan
- 2) Verifikasi perhitungan bunga, denda, amortisasi yang dilakukan
- 3) Test check perhitungan bunga
- 4) Test check kewajaran pendapatan bunga kredit
- 5) Test check pembukuan suatu dokumen pembukuan
- 6) Bandingkan laporan keuangan dengan laporan debitur
- 7) Lakukan wawancara apabila terdapat penyimpangan

4. Audit Kolektabilitas dan PPAP

Audit kolektabilitas dan PPAP memiliki prosedur sebagai berikut:

- 1) Interview proses penyusunan kolektabilitas dan pembentukan PPAP
- 2) Verifikasi kebenaran penilaian ulang nilai transaksi agunan
- 3) Verifikasi kebenaran penyusunan kolektabilitas kredit sesuai PBI no. 7/2 tahun 2005
- 4) Verifikasi kebenaran perhitungan PPAP sesuai SE BI
- 5) Verifikasi kebenaran pembebanan kelaporan laba/rugi cabang
- 6) Lakukan wawancara apabila terdapat penyimpangan

5. Audit Pelanggaran BMPK

- 1) Interview monitoring terhadap pelanggaran BMPK
- 2) Verifikasi perhitungan modal kerja
- 3) Bandingkan total kredit yang diberikan kepada masing-masing debitur dan kelompoknya dengan ketentuan

- 4) Bandingkan total kredit yang diberikan kepada masing-masing pihak terkait dengan ketentuan BMPK
- 5) Lakukan wawancara apabila terdapat masalah
6. Praktik-praktik Tidak Sehat
 - 1) Mark-up nilai objek pembiayaan kredit
 - 2) Mark-up nilai agunan
 - 3) Rekayasa perusahaan debitur
 - 4) Rekayasa laporan keuangan
 - 5) Manipulasi data calon debitur
 - 6) Penyalahgunaan fasilitas kredit
 - 7) Pelampauan BMPK
 - 8) Legalitas perusahaan debitur dimanipulasi
 - 9) Pemberian kredit tidak sesuai dengan kebutuhan

Pada akhir pemeriksaan, semua temuan-temuan ini kemudian dikumpulkan dan didokumentasikan dalam bentuk ikhtisar hasil audit. Ikhtisar hasil audit menjelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi/penyimpangan yang ditemukan, keadaan yang seharusnya terjadi, penyebab terjadinya penyimpangan, dampak dari terjadinya penyimpangan, dan rekomendasi Auditor Internal.

1.4.4. Pelaporan Hasil Audit

Setelah selesai melaksanakan audit bidang kredit, auditor akan membahas hasil audit dalam *exit meeting* bersama pimpinan BPR Rokan

Hulu dan menyampaikan temuan serta rekomendasi yang diberikan atas temuan tersebut.

Setelah *exit meeting* dilakukan, auditor akan membuat Laporan Hasil Audit (LHA) yang mencakup semua pemeriksaan termasuk kredit yang akan direview oleh direksi. Setelah semua dianggap sesuai dengan standar pelaporan menurut SPFAIB laporan hasil audit akan ditandatangani oleh direktur utama BPR Rokan Hulu.

1.4.5. Tindak Lanjut Hasil Audit

SPI memantau pelaksanaan tidak lanjut yang dilakukan oleh bagian kredit sampai batas waktu perbaikan yang telah ditentukan agar permasalahan yang sama tidak terjadi kembali dimasa yang akan datang. Pemantauan dilakukan melalui exit meeting lanjutan atau melihat laporan hasil tindak lanjut apakah rekomendasi telah dilaksanakan atau belum. Hasil tindak lanjut secara tertulis akan dilaporkan oleh SPI kepada direktur utama dan dewan komisaris atau pengawas BPR Rokan Hulu.

Jika dilihat dari sisi bagian kredit biasanya bagian kredit BPR Rokan Hulu selalu merealisasikan rekomendasi yang diberikan oleh tim audit. Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan tindak lanjut hasil audit meliputi kelemahan-kelemahan atau pelanggaran yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan, batas waktu perbaikan dan komitmen perbaikan yang akan dilakukan.

1.4.6. Dokumentasi dan Administrasi

SPI BPR Rokan Hulu selalu mendokumentasikan dan mengadministrasikan bukti-bukti dokumen sejak perencanaan tahap awal audit, persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi sampai pada pelaporan hasil audit. Dokumen akan disimpan rapi pada lemari arsip di bagian SPI BPR Rokan Hulu.

Dilihat dari pelaksanaan audit operasional kredit yang dilakukan oleh BPR Rokan Hulu secara keseluruhan telah sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang menjadi dasar pelaksanaan audit intern BPR Rokan Hulu sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan audit operasional kredit pada BPR Rokan Hulu telah memadai.

1.5. Peranan Audit Operasional dalam Meningkatkan Efektivitas Kredit

Efektivitas suatu entitas dapat dilihat dari hasil operasi entitas tersebut. Begitu pula efektivitas kegiatan perkreditan dapat dicapai jika sasaran atau tujuan kredit telah tercapai. Efektivitas kredit dapat dilihat dari tingkat *non performance loan* nya dibawah 5% seperti ketentuan dari Bank Indonesia dalam PBI No.8 tahun 2006.

Berikut ini adalah tingkat kolektabilitas kredit pada BPR Rokan Hulu 3 tahun terakhir.

Tabel V.1
Kualitas Kredit BPR Rokan Hulu
Per; 2010, 2011, 2012

Kualitas kredit	2010	2011	2012
Lancar	11.552.837.500	15.211.899.750	20.981.630.774
DPK	2.815.518.585	3.857.812.365	3.430.079.296
Kurang Lancar	241.657.399	169.481.637	256.399.474
Diragukan	154.912.567	219.329.108	349.651.389
Macet/tidak Lancar	311.961.773	170.271.173	171.399.765
Kredit yang disalurkan	15.076.887.824	19.628.794.033	25.189.160.698

Sumber: BPR Rokan Hulu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa BPR Rokan Hulu juga mengalami kredit bermasalah yang akan mempengaruhi efektivitas kredit yang dijalankan. Untuk mengetahui tingkat NPL kredit yang dialami BPR Rokan Hulu, tabel dibawah ini akan membahas hal tersenut.

Tabel V.2
NPL Kredit BPR Rokan Hulu

tahun	Kredit yang disalurkan	Kurang Lancar/Diragukan/macet	NPL Kredit
2010	15.076.887.824	708.531.739	4,7%
2011	19.628.794.033	559.081.918	2,9%
2012	25.189.160.698	777.450.628	3,09%

Sumber: olahan sendiri

Keterangan:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Macet/tidak Lancar}}{\text{Kredit yang disalurkan}} \times 100$$

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa NPL kredit pada tahun 2010 4,7% yang hampir mencapai batas maksimum NPL kredit yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Ketika dilakukan audit, auditor menemukan bahwa permasalahan kredit yang dihadapi oleh BPR Rokan Hulu bagian

penagihan kredit tidak bekerja secara maksimal yang dibuktikan dengan tidak adanya bukti atau arsip yang diberikan oleh bagian penagihan untuk memberitahukan nasabah tentang kreditnya yang belum dibayar sehingga membuat nasabah terbiasa dengan kondisi demikian.

Pada tahun 2011 NPL kredit dapat ditekan hingga 2,9% karena setelah dilakukan audit operasional kredit, bagian penagihan kredit BPR Rokan Hulu mengindahkan rekomendasi dari auditor internal atau SPI yaitu melakukan perubahan atau bagian penagihan berkomitmen untuk bekerja dengan maksimal, meningkatkan frekuensi kunjungan ke nasabah-nasabah serta mendokumentasikan setiap surat peringatan dan komitmen terhadap nasabah sehingga efektivitas kredit dapat ditingkatkan sebesar 1,8%.

Pada tahun 2012 NPL kredit agak sedikit kembali naik dari 2,9% menjadi 3,09% yaitu sekitar 0,19%. Setelah dilakukan audit ternyata hal ini disebabkan oleh pelemparan kredit yang menurun, kemampuan bayar nasabah menurun yang disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat yang rata-rata berkebun (sawit atau karet) menurun karena harga komoditi tersebut anjlok dan hal ini tidak bisa dihindari. Auditor merekomendasikan agar bagian penagihan melakukan pembinaan terhadap nasabah agar dapat membayar kreditnya walaupun hal ini tidak dapat dipaksakan karena memang harga komoditi perkebunan nasabah menurun.

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa audit operasional pada BPR Rokan Hulu berperan serta dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan pada Bank tersebut. Untuk masa yang akan datang diharapkan pelaksanaan audit operasional kredit terus dilakukan untuk menekan resiko-resiko kredit yang dapat menyebabkan NPL kredit meningkat.

BAB VI

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1. Pelaksana audit operasional pada BPR Rokan Hulu dilakukan oleh auditor intern selaku SPI di bank tersebut. Secara umum auditor internal telah melaksanakan tugasnya sebagai auditor yang independen dan sesuai Standar Praktik Profesi Audit Internal (SPPAI) yang menjadi pedoman auditor dalam bertugas.
2. Pelaksanaan audit operasional kredit pada BPR Rokan Hulu telah memadai karena audit dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI.1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).
3. Pelaksanaan audit operasional cukup berperan dalam meningkatkan efektivitas kredit pada BPR Rokan Hulu. Hal ini dilihat dari tingkat NPL kredit 4,7% pada tahun 2010 menurun hingga 2,9% pada tahun 2011 karena bagian kredit melaksanakan rekomendasi auditor untuk meningkatkan efektivitas kredit walaupun pada tahun 2012 NPL Kredit sedikit mengalami kenaikan 0,19% yaitu menjadi 3,1% namun hal itu disebabkan oleh faktor kesejahteraan ekonomi masyarakat yang menurun akibat dari fluktuasi harga perkebunan kelapa sawit dan karet yang menyebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam melunasi kreditnya karena mayoritas masyarakat berusaha dibidang perkebunan kelapa sawit ataupun karet.

1.2.Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan hanya mengamati peningkatan efektivitas kredit berdasarkan pelaksanaan audit operasional tanpa mengamati aspek lain yang juga dapat meningkatkan efektivitas kredit. Hal ini dikarenakan segala keterbatasan peneliti baik itu dari segi waktu maupun biaya yang ada.

Penelitian ini juga hanya menyebutkan temuan-temuan yang terjadi selama periode yang diteliti tanpa menjelaskan bagaimana proses audit yang dilakukan sehingga temuan-temuan tersebut dapat ditemukan. Hal ini juga disebabkan oleh keterbatasan informasi dan data yang diperoleh karena data tersebut merupakan privasi Bank yang bersangkutan.

1.3. Saran

Untuk penelitian berikutnya diharapkan agar mahasiswa/i dapat mengkaji peningkatan efektivitas dengan mengamati aspek-aspek lain yang juga dapat meningkatkan efektivitas kredit. Selain itu peneliti berikutnya semoga dapat menjelaskan proses temuan-temuan yang ditemukan.

Pihak Bank juga diharapkan bisa memberikan data-data yang sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih obyektif tanpa ada sesuatu yang ditutup-tutupi demi keabsahan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Hoesasa, 2009. *Bunga Rampai Auditing*, Salemba Empat, Jakarta
- Al-Qur'an, 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Sinar Baru Algensindo, Jakarta.
- Arens, A.Alvin, Elder, J.Randal, Beasley, S.Mark. 2008. *Auditing and Assurance Service an Integrated Approach*. 12th Edition, Upper Sadel River, New Jersey, Pearson Education International.
- Bayangkara IBK, 2008. *Auditing Manajemen Prosedur dan Implementasi*, salemba Empat, Jakarta
- Dendawijaya Lukman, 2009. *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- Guy M Dan, 2002. *Auditing*, Jilid I, Erlangga, Jakarta.
- _____, 2003. *Auditing*, Jilid II, Erlangga, Jakarta.
- Heri, 2011. *Auditing 1: Dasar-dasar Pemeriksaan Akuntansi*, Kencana, Jakarta.
- Idroes Ferry N, Sugiarto, 2006. *Manajemen Resiko Perbankan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ismail, 2011. *Akuntansi bank teori dan aplikasi rupiah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Johnson, Boyton, dkk, 2003. *Modern Auditing*, Jilid 1, Erlangga, Jakarta
- _____, 2003. *Modern Auditing*, Jilid 2, Erlangga, Jakarta
- Kasmir, 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, PT Raja Grafindo Persada, jakarta.
- Malayu, 2005. *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Naja Daeng, 2006. *Legal Audit Operasional Bank*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/6/PBI/2007 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor:1/6/PBI/1999 Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor:8/13/2006 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

Silvanita Ktut Mangani, 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Erlangga, Jakarta.

Simorangkir, 2004. *Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.

Standar Praktik Profesi Audit Internal

Sukrisno Agoes, 2004. *Auditing*, jilid I, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

_____, 2004. *Auditing*, Jilid 2, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Supramono Gatot, 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta.